



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI  
TAHUN 2023**



**SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
2021**



## KATA PENGANTAR

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi merupakan unit kerja Eselon II Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, setiap tahun menyusun Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi yang akan menjadi acuan dan tuntunan bagi setiap penanggung jawab kegiatan kesekretariatan agar dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan dan strategis untuk mencapai tujuan kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023.

Disamping hal tersebut, Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 juga mengakomodir perubahan kebijakan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Semoga dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 diharapkan dapat memandu tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

Jakarta, 2022

SEKRETARIS  
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

PANDU YUNianto

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19650606 198803 1 001

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1.	Di Konsep	Nadia Milla Hanifah	Perencana Pertama	10-10-2022	
2.	Di Periksa	Ferdian Danu Triantono	Perencana Muda	10-10-2022	
3.	Di Setujui	Imam Prasetyo	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	10-10-2022	

**RESUME RENCANA KINERJA TAHUNAN  
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI  
TAHUN 2023**

KODE	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	KODE	INDIKATOR KINERJA (IKP/IKK)	SATUAN	2023
SP 1	Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		
		IKP 1	Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	Indeks	Cukup
		IKP 2	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (tahun berjalan)	%	85
		IKP 3	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2)	%	32
SP2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 4	Nilai Indeks RB BKT	Indeks	80
SK 2	Terselenggarannya Koordinasi perumusan kebijakan transportasi yang efektif	IKK 5	Perumusan Kebijakan Transportasi yang di selaraskan pada tahun berjalan	%	100
SK 3	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum BKT	IKK 6	Tingkat pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT	%	95
SK 4	Meningkatnya Birokrasi BKT yang Akuntabel	IKK 7	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3
		IKK 8	Indeks Perencanaan BKT	Indeks	84
		IKK 9	Indeks Pengelolaan Keuangan BKT	Indeks	88,2
		IKK 10	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT	%	86
		IKK 11	Nilai SAKIP BKT	Nilai	81
		IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73
SK 5	Meningkatnya kapabilitas organisasi dan SDM BKT	IKK 13	Indeks Kelembagaan BKT	Indeks	79,5
		IKK 14	Indeks Profesionalisme ASN BKT	Indeks	74
		IKK 15	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT	Indeks	0,96
SK 6	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik BKT Perhubungan	IKK 16	Tingkat penggunaan layanan perpustakaan	Nilai	75
		IKK 17	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	92
		IKK 18	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	75

Jakarta, 2022

SEKRETARIS  
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

PANDU YUNIANTO  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19650606 198803 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RESUME RKT SEKRETARIAT BALITBANG PERHUBUNGAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II      TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT BADAN</b>	
<b>            PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN.....</b>	<b>4</b>
A. Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
B. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
<b>BAB III     PERENCANAAN STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN</b>	
<b>            PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN</b>	
<b>            TAHUN 2020-2024 .....</b>	<b>12</b>
A. Tujuan Badan Kebijakan Transportasi 2020-2024 .....	12
B. Sasaran Strategis Badan Kebijakan Transportasi 2020-2024 .	12
C. Target Kinerja 2020-2024 .....	15
D. Arah Kebijakan Badan Kebijakan Transportasi .....	19
E. Peran dan Fokus Badan Kebijakan Transportasi .....	29
<b>BAB IV     RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BADAN</b>	
<b>            PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN TAHUN</b>	
<b>            2022 .....</b>	<b>20</b>
A. Program Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	
Tahun 2023 .....	20
B. Target Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun	
2023 .....	22

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1.</b>	Sumber Dara Manusia Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi .....	10
<b>Tabel 2.2.</b>	Perkembangan Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 .....	11
<b>Tabel 3.1.</b>	Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 .....	13
<b>Tabel 3.2.</b>	Indikator Kinerja Utama Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020 - 2024 .....	15
<b>Tabel 3.3.</b>	Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 .....	18

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 2.1.</b> Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi .....	5
<b>Gambar 2.2.</b> Struktur Organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi .....	6
<b>Gambar 4.1.</b> Pemetaan Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi .....	21

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi, dimana Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi merupakan unit kerja penunjang Eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Transformasi Badan Litbang menjadi BKT mendasari penyempurnaan/penyesuaian dalam melakukan evaluasi/Reviu Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan 2020-2024 menjadi Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024.

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2023, merupakan salah satu bentuk dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) dengan mengimplementasikan salah satu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan alat ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023. Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024.

Penetapan kontrak kinerja (*Performance Contract*) Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi dengan Kepala Badan Kebijakan Transportasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berbasis pada Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kebijakan Transportasi. Melalui penetapan kinerja dimaksud akan diperoleh kinerja aktual yang harus dilaporkan sebagai pertanggungjawaban keuangan yang dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan syarat dalam penyusunan SAKIP yang akan digunakan oleh para pejabat dalam mengelola dan meningkatkan kinerja organisasinya. Rencana kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi merupakan butir-butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (*performance Agreement*) ataupun *Service Agreement* dan merupakan dokumen "Kontrak" antara pimpinan unit organisasi (Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi dan Para

Kepala Pusat Kebijakan Transportasi) dengan Pimpinan Badan Kebijakan Transportasi.

Pada konteks implementasi SAKIP, Rencana Kinerja ini adalah rencana tahunan (*annual performance plan*), yang merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Rencana kinerja ini dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, guna mempermudah mengaitkannya dengan pengalokasian sumber daya, terutama anggaran.

Memperhatikan adanya perubahan nomenklatur struktur dan tata organisasi Badan Kebijakan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan serta telah disusunnya Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 maka perlu disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023. Hal ini dimaksudkan untuk menselaraskan rangkaian dokumen perencanaan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Tujuan umum dibuatnya Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023, diantaranya adalah:

- a. Mengakomodir adanya perubahan kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- b. Menselaraskan dokumen perencanaan di tingkat Eselon II Badan Kebijakan Transportasi.
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Tujuan khusus dibuatnya Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023, diantaranya adalah:

- a. Mengakomodir perubahan indikator capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 dan Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024.
- b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur melalui penetapan target kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama.
- c. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.



- d. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan pemberian *punishment* (sanksi).

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**

##### **A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas pokok Badan Kebijakan Transportasi adalah menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Badan Kebijakan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi.
2. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi.
3. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang transportasi.
4. Pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan transportasi.
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang transportasi.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi.
7. Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Transportasi.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Organisasi Badan Kebijakan Transportasi dipimpin oleh Pejabat Eselon I, Kepala Badan Kebijakan Transportasi dan membawahi lima unit kerja sejajar Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan tersebut struktur organisasi Badan Kebijakan Transportasi adalah sebagaimana pada Gambar 2.1 berikut ini.



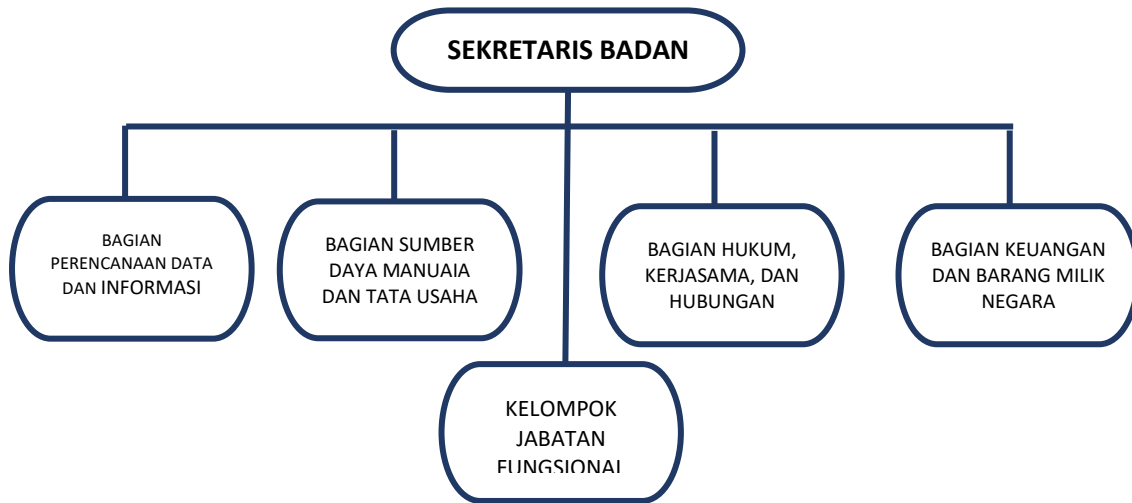
**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi memiliki tugas dan fungsi:

Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

- Fungsi:
- Penyiapan rencana, program, anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan data dan sistem informasi;
  - Penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi dan ketatausahaan serta pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang analisis kebijakan dan kepustakaan;
  - Penyiapan pelaksanaan urusan hukum, kerjasama, hubungan masyarakat, publikasi, serta dokumentasi dan kepustakaan;
  - Penyiapan pelaksanaan urusan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, serta kerumahtanggaan;

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018, struktur organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.2.



**Gambar 2.2 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi**

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian (setingkat Eselon III) di unit kerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

### **1. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi**

Tugas :

Melaksanakan penyiapan rencana, program, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan data dan sistem informasi.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program, monitoring dan evaluasi kegiatan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja, perjanjian kinerja, pelaksanaan akuntabilitas, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan.
- d. Penyiapan bahan pengelolaan data, pelaksanaan manajemen sistem informasi, dan penyajian statistik di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional

### **2. Bagian Sumber Daya Manuasia dan Tata Usaha**

Tugas:

Melaksanakan penyiapan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan ketatausahaan, serta pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang analisis kebijakan dan kepastakaan..

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, rencana kebutuhan sumber daya manusia, mutasi dan kepangkatan, pola karier, pemeliharaan basis data sumber daya manusia, penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan jabatan fungsional di bidang analisis kebijakan dan kepustakaan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, serta pengawasan kepatuhan internai; dan
- d. Penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan, keprotokolanan dan kearsipan.

Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional

### **3. Bagian Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat**

Tugas:

Melaksanakan penyiapan urusan hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, publikasi, serta dokumentasi dan kepustakaan.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundang undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, evaluasi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi hukum, serta urusan kerjasama;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat, pengelolaan informasi publik, peliputan, pemberitaan dan pemuatan media, layanan pengaduan, serta pengelolaan publikasi kegiatan; dan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan kepustakaan, serta publikasi hasil kajian kebijakan.

Bagian Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

### **4. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara**

Tugas :

Melaksanakan penyiapan urusan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, serta kerumahtanggaan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan, serta tindak lanjut hasil audit; dan

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, aset, serta urusan kerumahtanggaan.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

## **B. PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1. Pelaksanaan Perumusan Rekomendasi Kebijakan**

Sebagai institusi yang bergerak di bidang kebijakan transportasi, Badan Kebijakan Transportasi memberikan masukan dalam penyempurnaan kebijakan. Bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- a) Sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan perhubungan, yaitu berupa masukan dalam pengambilan keputusan tingkat kementerian maupun unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan serta instansi lain terkait;
- b) Sebagai *draft* konsep masukan kebijakan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah atau Dinas Perhubungan terkait;
- c) Dimuat dalam publikasi ilmiah, baik publikasi internal Kementerian Perhubungan, maupun publikasi eksternal yakni pada level publikasi nasional dan internasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi meliputi kegiatan pokok perumusan kebijakan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, yang sifatnya lintas sektoral, sarana transportasi, Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan, Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan sebagai *business core* Badan Kebijakan Transportasi.

Sedangkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi lebih bersifat internal dan bersifat dukungan, yaitu meliputi kegiatan pokok pelaksanaan perencanaan dan kerjasama, pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha, pelayanan data, hubungan masyarakat, publikasi dan pelaksanaan urusan keuangan serta perlengkapan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Pelaksanaan sebagian besar kegiatan di Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi merupakan capaian dari program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Terkait program perumusan kebijakan, dukungan dari Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2022 adalah berupa dukungan kebijakan internal Badan Kebijakan Transportasi sebanyak 6 (enam) dengan judul :

- a. Dokumen Penataan Organisasi Badan Kebijakan Transportasi;
- b. Penyusunan Roadmap skema pendanaan alternatif penelitian kebijakan transportasi;
- c. Penyusunan grand design penataan regulasi dan kebijakan layanan transportasi berbasis aplikasi
- d. Penyusunan In house Consultant penerapan good governance dan keberlanjutan rumusan kebijakan
- e. Pengembangan TIK Badan Kebijakan Transportasi.

Sementara untuk Tahun 2023 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi mengusulkan rekomendasi kebijakan internal sebanyak 4 studi, dengan judul :

- a. Survei Makro Transportasi Nasional;
- b. Analisis Indeks Kualitas Kebijakan;
- c. Penyusunan Roadmap Perumusan Kebijakan di Badan Kebijakan Transportasi;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola Kebijakan Sektor Transportasi;
- e. In House Consultant Perencanaan Rumusan Kebijakan Bidang Transportasi.

Peran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi sesungguhnya sebagai koordinator pada kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, yaitu meliputi kegiatan penunjang serta pembinaan. Kegiatan pembinaan sumber daya manusia meliputi tenaga fungsional baik tenaga analis kebijakan, perekayasa penelitian, serta kegiatan penunjang yang terkait dengan pengembangan wawasan dan profesionalisme. Sementara kegiatan penunjang kebijakan berupa penyediaan sarana dan prasarana.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelayanan dukungan teknis dan administratif di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Jumlah SDM Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022 mencapai 113 orang dengan rincian sebagai berikut Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi**

NO	UNIT KERJA ESELON III	PNS	KONTRAK
1	Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	21	6
2	Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha	16	12
3	Bagian Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	22	7
4	Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	22	7
<b>Total</b>		<b>81</b>	<b>32</b>

Sumber: Badan Kebijakan Transportasi, Tahun 2022

Jumlah pegawai Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menurut tingkat pendidikan yaitu S2 sebanyak 24 orang, S1/DIV sebanyak 39 orang, DIII sebanyak 9 orang, DI sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 8 orang. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 37 orang PNS dan 21 orang Non PNS, perempuan sebanyak 44 orang PNS dan 11 orang Non PNS.

### 3. Anggaran

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penentuan skala prioritas pengalokasian anggaran pembangunan dilakukan untuk keperluan yang penting akan didahulukan. Efisiensi operasional kegiatan dilakukan melalui pembatasan penggunaan listrik, telepon dan air serta meningkatkan kerjasama perumusan kebijakan dengan pihak terkait seperti dengan perguruan tinggi, Lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai koordinator dalam penyusunan rencana anggaran di lingkup Badan Kebijakan Transportasi beberapa upaya telah dilakukan dalam manajemen anggaran sepanjang tahun 2022-2024 meliputi:

1. Peningkatan anggaran rupiah murni DIPA, melalui peningkatan kinerja;
2. Khusus untuk anggaran perumusan kebijakan, disusun berdasarkan usulan proposal yang diajukan dan isu terkini transportasi dan telah disetujui untuk dibiayai dengan mengacu pada anggaran perumusan kebijakan Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020-2024;
3. Penguatan jejaring kemitraan dengan *donor agencies*, lembaga penelitian di tingkat nasional dan internasional (antara lain: CLCF, KOTI, KOICA).

Perkembangan anggaran pembangunan dan rutin Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1.



**Tabel 2.2 Perkembangan Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2019-2023**

NO.	TAHUN	JUMLAH (RP)
1	2019	47.569.996.000
2	2020	57.604.911.000
3	2021	58.184.697.000
4	2022	72.869.932.000
5	2023	75.642.991.000

Sumber : Data diolah Setbadan Litbang Phb, 2022

**BAB III**  
**PERENCANAAN STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**  
**TAHUN 2020-2024**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional. Dengan perencanaan strategis yang jelas, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Dalam Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala. Dalam hal ini perencanaan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022-2024 yang telah diselaraskan dengan perencanaan di tingkat kementerian sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024.

**A. TUJUAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI 2020-2024**

Tujuan adalah penjabaran visi dan dilengkapi dengan indikator tujuan dan rencana sasaran strategis. Adapun tujuan dan indikator tujuan yang ingin dicapai Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 2020-2024 adalah “Terwujudnya Dukungan Perumusan Rekomendasi Kebijakan dan Pemanfaatan Hasil Inovasi di Bidang Perhubungan”

**B. SASARAN STRATEGIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI 2020-2024**

Berdasarkan Permen No. 5 Tahun 2014, sasaran strategis (*outcome/impact*) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program/kegiatan. Dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024, maka sasaran Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kebijakan transportasi;
2. Peningkatan pemanfaatan rekomendasi BKT dalam perumusan kebijakan transportasi;
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penunjang perumusan kebijakan transportasi.

Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator masing-masing sasaran. Perumusan indikator sasaran menjadi landasan untuk perumusan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai tolok ukur kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024. Konektivitas perumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Kebijakan Transportasi untuk kurun waktu 2020-2024 disampaikan pada tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran  
Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024**

<b>SASARAN PROGRAM (SP)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)</b>	<b>SASARAN KEGIATAN (SK)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)</b>
SP.1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi	IKP 1 Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	SK.1 Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	IKK 1 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (tahun berjalan)
	IKP 2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (tahun berjalan)		IKK 2 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)
	IKP 3 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (t-2)		IKK 3 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (tahun berjalan)
			IKK 4 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)
		SK.2 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Efektif	IKK 5 Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan
SP. 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	IKP 4 Nilai Indeks RB Badan Kebijakan Transportasi	SK.3 Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi Yang	IKK 6 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi
			IKK 7 indeks Perencanaan Badan Kebijakan

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
Pemerintahan Yang Baik		Akuntabel	Transportasi
			IKK 8 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi
			IKK 9 Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi
			IKK 10 Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi
			IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi
			IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Perkantoran
		SK.4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Badan Kebijakan Transportasi	IKK 13 Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi
		SK.5 Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Sumber Daya Manusia Badan Kebijakan Transportasi	IKK 14 Indeks Kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi
			IKK 15 Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi
			IKK 16 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi
		SK.6 Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Badan Kebijakan Transportasi	IKK 17 Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan
			IKK 18 Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data
			IKK 19 Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi

Sumber: Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024

Peran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai koordinator program dukungan manajemen dan manajemen teknis lainnya yaitu meliputi kegiatan penunjang serta pembinaan pegawai Badan Kebijakan Transportasi secara keseluruhan.

## C. TARGET KINERJA 2022-2024

### 1) Indikator Kinerja Utama Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024

Outcome Badan Kebijakan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Perhubungan adalah Meningkatnya kualitas penelitian sesuai kebutuhan dengan indikator prosentase penelitian yang dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan. Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 disusun dengan pertimbangan bahwa IKP tersebut merupakan indikator hasil (outcome) pada tingkat Eselon I. Selanjutnya pencapaian IKP dilakukan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai indikator keluaran (output) yang merupakan target capaian setiap kegiatan setingkat Eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Secara rinci target capaian kinerja (IKP) Badan Kebijakan Transportasi per-tahun dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024**

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA (IKP/IKK)	SATUAN	TARGET KINERJA		
			2022	2023	2024
SP.1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>				
	IKP 1 Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	Indeks	50 (Cukup)	50 (Cukup)	65 (Baik)
	IKP 2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (tahun berjalan)	%	80	85	90
	IKP 3 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (t-2)	%	30	32	32
SP. 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	IKP 4 Nilai Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	79,5	80	80,5
SK.1 Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)</b>				
	IKK 1 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (tahun berjalan)	%	80	85	90
	IKK 2 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)	%	37	38	39
	IKK 3 Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (tahun berjalan)	%	80	85	90
	IKK 4 Persentase	%	30	32	32

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA (IKP/IKK)	SATUAN	TARGET KINERJA		
			2022	2023	2024
	Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)				
SK.2 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Efektif	IKK 5 Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan	%	100	100	100
SK.3 Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi Yang Akuntabel	IKK 6 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	3
	IKK 7 indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	82	84	85
	IKK 8 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	86,2	88,2	90,2
	IKK 9 Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	80	81	82
	IKK 10 Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	75	76	77
	IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	85	86	87
	IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	72	73	74
SK.4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Badan Kebijakan Transportasi	IKK 13 Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi	%	90	95	100
SK.5 Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Sumber Daya Manusia Badan Kebijakan Transportasi	IKK 14 Indeks Kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	79	79,5	80
	IKK 15 Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	73	74	75
	IKK 16 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	0,92	0,96	1
SK.6 Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Badan Kebijakan Transportasi	IKK 17 Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan	Nilai	70	75	75
	IKK 18 Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	92	92	93
	IKK 19 Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	70	75	75

Sumber: Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024

## 2) Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi 2022-2024

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Sesuai dengan tupoksi Badan Kebijakan Transportasi dan mengacu pada pedoman restrukturisasi program dan kegiatan maka program untuk tingkat Eselon I yang diusulkan adalah: **“Program Infrastruktur Konektivitas.”**

Adapun pencapaian sasaran program tersebut akan sangat bergantung dari kinerja program Badan Kebijakan Transportasi, yaitu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai indikator keluaran (*output*) yang merupakan target capaian setiap kegiatan setingkat Eselon II.

Restrukturisasi program Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022-2024 menghasilkan dua kegiatan, yaitu kegiatan utama dan pendukung: (1) perumusan kebijaka dan (2) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya.

*Output* unit kerja Eselon II untuk Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam hal ini lebih di titik beratkan pada kegiatan program Dukungan Manajemen dan Manajemen Teknis Lainnya mengingat peran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi sebagai koordinator pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif penelitian dan pengembangan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Secara rinci target capaian program Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

**Tabel 3.3 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024**

KODE	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	KODE	INDIKATOR KINERJA (IKP/IKK)	SATUAN	2023
SP 1	Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		
		IKP 1	Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	Indeks	Cukup
		IKP 2	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (tahun berjalan)	%	85
		IKP 3	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2)	%	32
SP2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 4	Nilai Indeks RB BKT	Indeks	80
SK 2	Terseleenggarannya Koordinasi perumusan kebijakan transportasi yang efektif	IKK 5	Perumusan Kebijakan Transportasi yang di selaraskan pada tahun berjalan	%	100
SK 3	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum BKT	IKK 6	Tingkat pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT	%	95
SK 4	Meningkatnya Birokrasi BKT yang Akuntabel	IKK 7	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3
		IKK 8	Indeks Perencanaan BKT	Indeks	84
		IKK 9	Indeks Pengelolaan Keuangan BKT	Indeks	88,2
		IKK 10	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT	%	86
		IKK 11	Nilai SAKIP BKT	Nilai	81
		IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73
SK 5	Meningkatnya kapabilitas organisasi dan SDM BKT	IKK 13	Indeks Kelembagaan BKT	Indeks	79,5
		IKK 14	Indeks Profesionalisme ASN BKT	Indeks	74
		IKK 15	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT	Indeks	0,96
SK 6	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik BKT Perhubungan	IKK 16	Tingkat penggunaan layanan perpustakaan	Nilai	75
		IKK 17	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	92
		IKK 18	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	75

#### D. ARAH KEBIJAKAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Dalam upaya memberikan dukungan terhadap pencapaian sasaran meningkatnya kualitas kebijakan dalam mendukung pembangunan bidang transportasi dan prioritas pembangunan Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 serta memperhatikan permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi Badan Kebijakan Transportasi, maka dirumuskan arah kebijakan dan strategis untuk Badan Kebijakan Transportasi:

1. Arah kebijakan dan strategi implementasi dalam pencapaian Sasaran Program (SP1) Meningkatkan Kualitas Kebijakan Transportasi, meliputi:



- a. Arah Kebijakan (AK1) Peningkatan rumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana dengan 8 strategi implementasi.
  - b. Arah Kebijakan (AK2) Peningkatan rumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana pendukung major project RPJMN dengan 11 strategi implementasi.
  - c. Arah Kebijakan (AK2) Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan transportasi dengan 5 strategi implementasi.
2. Arah kebijakan dan strategi implementasi dalam pencapaian Sasaran Program (SP2) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, meliputi
- a. Arah Kebijakan (AK4) Peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi, dengan 2 strategi implementasi. Arah Kebijakan (AK5) Peningkatan efektivitas manajemen kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dengan 3 strategi implementasi

#### **E. PERAN DAN FOKUS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**

Berangkat dari Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Badan Kebijakan Transportasi selanjutnya ditetapkan peran dan fokus kegiatan Badan Kebijakan Transportasi kedepan untuk kurun waktu 2020-2024. Adapun peran Badan Kebijakan Transportasi kedepannya diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi dan tugas Badan Kebijakan Transportasi dalam penyusunan dan perumusan kebijakan transportasi. Sedangkan fokus kegiatan Badan Kebijakan Transportasi meliputi penjabaran peran Badan Kebijakan Transportasi terkait dengan fungsi pelayanan Badan Kebijakan Transportasi.

Peran Badan Kebijakan Transportasi untuk kurun waktu 2022-2024 diharapkan dapat dioptimalkan dan diarahkan sebagai sebagai pusat unggulan (center of excellence) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang antisipatif dan responsif guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah

## BAB IV

### RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2023

Rencana strategis dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode satu tahun ke depan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perumusan rekomendasi kebijakan, sejalan dengan tujuan dan sasaran perhubungan tahun 2020–2024, maka setiap tahun disusun program dan kegiatan pembangunan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

#### A. Program Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berperan sebagai koordinator pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif perumusan kebijakan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Perhubungan Tahun 2023, program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan perumusan kebijakan yang sesuai dengan perencanaan dalam mendukung sistem transportasi di Ibukota Negara baru, serta isu-isu strategis lainnya dan arahan pimpinan dalam mendukung fungsi Badan Kebijakan Transportasi untuk membentuk rekomendasi kepada Menteri Perhubungan;
2. Melaksanakan kegiatan penunjang dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga fungsional Anjak melalui kursus-kursus dan kerjasama dengan lembaga kebijakan nasional dan internasional dan; serta
3. Peningkatan sistem dan jaringan data dan informasi berupa penerbitan publikasi perhubungan, seminar nasional dan internasional, pengembangan *e-library* dan fasilitator berbagai kegiatan kelitbangan lainnya seperti rakornis, temu karya, *workshop*, dan *focus group discussion*.

Pemetaan kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 adalah sebagaimana gambar 4.1 berikut:



**Gambar 4.1. Pemetaan Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi**

Alokasi anggaran TA 2023 sebesar Rp.75.642.991.000 (4,9 % dari total Pagu Alokasi Anggaran BKT TA 2023). Dalam alokasi tersebut selain digunakan untuk kegiatan tugas dan fungsi Sekretariat Badan, juga mengakomodir kebutuhan belanja pegawai dan perawatan kantor pada unit Pusat Kebijakan yang dialokasikan secara terpusat pada pagu Setbadan. Komposisi Pagu Alokasi Sekretariat Badan berdasarkan program adalah Program Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp. 12.358.412.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 63.284.579.000. Sedangkan berdasarkan Jenis Belanja adalah Belanja Pegawai sebesar Rp.35.536.273.000, Belanja Barang Operasional sebesar Rp.16.703.039.000, Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp.23.403.679.000

Dalam pelaksanaan TA 2023, Setbadan memiliki 5 (lima) Kegiatan Quickwin dalam mendukung pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan, antara lain:

1. Survei Indikator Makro Transportasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara utuh terhadap kondisi dan perkembangan transportasi nasional setiap tahun;
2. Dukungan Harmonisasi Rancangan Kebijakan dan NSPK yang bertujuan untuk memberikan dukungan koordinasi terhadap harmonisasi rancangan kebijakan dan NSPK ke Biro hukum;
3. Pembinaan Tata Kelola Kebijakan Transportasi yang bertujuan memberikan sosialisasi kepada seluruh stakeholder transportasi (khususnya Pemda) mengenai mekanisme penetapan kebijakan/regulasi transportasi tingkat daerah yang perlu disinkronkan dengan kebijakan/regulasi tingkat nasional;

4. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri yang bertujuan memberikan fasilitasi kerjasama luar negeri dalam pendalaman perumusan kebijakan transportasi diantaranya koordinasi dan kunjungan strategis dengan mitra negara sahabat (Belanda, London, dan Jepang).
5. Roadmap Perumusan Kebijakan yang bertujuan memberikan roadmap Perumusan Kebijakan Nasional yang efektif dan efisien serta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan

#### **B. Target Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 dan target kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dapat dilihat pada lampiran dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023 ini.

**Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi  
Tahun : 2023**

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)  
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**

KODE	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	KODE	INDIKATOR KINERJA (IKP/IKK)	SATUAN	2023
SP 1	Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		
		IKP 1	Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	Indeks	Cukup
		IKP 2	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (tahun berjalan)	%	85
		IKP 3	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2)	%	32
SP2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 4	Nilai Indeks RB BKT	Indeks	80
SK 2	Terselenggaranya Koordinasi perumusan kebijakan transportasi yang efektif	IKK 5	Perumusan Kebijakan Transportasi yang di selaraskan pada tahun berjalan	%	100
SK 3	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum BKT	IKK 6	Tingkat pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT	%	95
SK 4	Meningkatnya Birokrasi BKT yang Akuntabel	IKK 7	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3
		IKK 8	Indeks Perencanaan BKT	Indeks	84
		IKK 9	Indeks Pengelolaan Keuangan BKT	Indeks	88,2
		IKK 10	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT	%	86
		IKK 11	Nilai SAKIP BKT	Nilai	81
		IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73
SK 5	Meningkatnya kapabilitas organisasi dan SDM BKT	IKK 13	Indeks Kelembagaan BKT	Indeks	79,5
		IKK 14	Indeks Profesionalisme ASN BKT	Indeks	74
		IKK 15	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT	Indeks	0,96
SK 6	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik BKT Perhubungan	IKK 16	Tingkat penggunaan layanan perpustakaan	Nilai	75
		IKK 17	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	92
		IKK 18	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	75